

RINGKASAN

Herika Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Pembantu
Nofita Penasihat Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk (BP4R) Di Polres
247410101047 Lhokseumawe Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H)

Pelaksanaan fungsi BP4R di Polres Lhokseumawe saat ini menghadapi persoalan efektivitas yang kompleks, jika ditinjau dari perspektif hukum tata negara yang menjunjung tinggi asas *independence of judiciary*. Secara yuridis, kedudukan BP4R sebagai lembaga internal kepolisian menciptakan ketidakefektifan karena memosisikan izin administratif dari lembaga eksekutif (Polri) sebagai syarat formil dalam mengajukan perceraian yang dapat menghambat akses warga negara (anggota Polri) menuju lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi ini diperparah dengan fakta sosiologis di Polres Lhokseumawe selama periode tahun 2023-2025, di mana fungsi mediasi dan rekonsiliasi yang dijalankan BP4R terbukti belum optimal dalam menekan angka perceraian, mengingat sebagian besar pasangan tetap memilih berpisah dan jumlah pemohon justru menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.

Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisis Pelaksanaan Fungsi BP4R Di Polres Lhokseumawe Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, menganalisis efektivitas hukum dalam Pelaksanaan Fungsi BP4R Di Polres Lhokseumawe, dan menganalisis solusi terhadap faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi BP4R Di Polres Lhokseumawe

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah teknik penelitian lapangan. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Pelaksanaan fungsi BP4R di Polres Lhokseumawe sebagai bentuk pengawasan preventif Hukum Tata Negara yang menempatkan perceraian anggota Polri sebagai urusan administratif publik demi menjaga integritas korps serta perlindungan hak konstitusional keluarga. Ketidakefektifan BP4R Polres Lhokseumawe dalam mencegah perceraian disebabkan oleh faktor masyarakat (pasangan suami isteri) yang memiliki sikap saling egois. Sikap tersebut melumpuhkan fungsi mediasi BP4R dalam mencegah perceraian, sehingga instrumen hukum ini gagal mencapai tujuannya. BP4R Polres Lhokseumawe mengatasi hambatan egoistik pasangan melalui pendekatan holistik yang meliputi konseling psikologis profesional, mediasi persuasif, dan penguatan Binrohtal.

Disarankan intervensi BP4R lebih proaktif dalam menjaga stabilitas personel. Disarankan agar Polres Lhokseumawe mentransformasi tahap mediasi dengan mengadopsi konseling psikologis intensif sebelum sidang formal untuk mereduksi egoisme dan sikap defensif pasangan yang ingin bercerai. Disarankan penguatan aspek kearifan lokal melalui keterlibatan aktif keluarga besar atau tokoh adat dalam proses mediasi personal.

SUMMARY

Herika *Legal Review of the Implementation of the Functions of the*
Nofita *Marriage, Divorce, and Reconciliation Advisory Agency (BP4R)*
247410101047 *at the Lhokseumawe Police from the Perspective of*
 Constitutional Law

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum and Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H)

The implementation of the BP4R function at the Lhokseumawe Police is currently facing complex effectiveness issues, when viewed from the perspective of constitutional law which upholds the principle of independence of the judiciary. Legally, the position of BP4R as an internal police institution creates ineffectiveness because it positions administrative permission from the executive branch (Polri) as a formal requirement in filing for divorce which can citizens' (Polri members) access to judicial institutions as regulated in Law Number 16 of 2019. This condition is exacerbated by sociological facts at the Lhokseumawe Police during the 2023-2025 period, where the mediation and reconciliation functions carried out by BP4R have proven to be less than optimal in reducing the divorce rate, considering that most couples still choose to separate and the number of applicants actually shows an increasing trend every year.

The purpose of this thesis research is to analyze the implementation of the BP4R function at the Lhokseumawe Police from the perspective of constitutional law, analyze the effectiveness of the law in the implementation of the BP4R function at the Lhokseumawe Police, and analyze solutions to the inhibiting factors in the implementation of the BP4R function at the Lhokseumawe Police.

The research method used is empirical juridical with a legal sociology approach. The data collection technique used in this thesis is field research. Data analysis in writing this thesis is carried out in 4 (four) stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions..

The implementation of the BP4R function at the Lhokseumawe Police as a form of preventive supervision of Constitutional Law which places divorce of Polri members as a public administrative matter in order to maintain the integrity of the corps and protect the constitutional rights of families. The ineffectiveness of the BP4R of the Lhokseumawe Police in preventing divorce is caused by societal factors (husband and wife) who have a selfish attitude. This attitude paralyzes the BP4R's mediation function in preventing divorce, so that this legal instrument fails to achieve its objectives. The BP4R of the Lhokseumawe Police overcomes the egoistic obstacles of couples through a holistic approach that includes professional psychological counseling, persuasive mediation, and strengthening of Binrohtal.

It is recommended that BP4R intervention be more proactive in maintaining personnel stability. It is recommended that the Lhokseumawe Police transform the mediation phase by adopting intensive psychological counseling before formal trials to reduce egotism. It is recommended that local wisdom be strengthened through the active involvement of extended families or traditional leaders in the personal mediation process.